



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp.6221-3925227 Fax.6221-3925227 Website:www.komnasham.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 002/PENG-PANSELCPNS-KH/X/2018

Tentang

**PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadwal Pendaftaran semula berakhir pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 23.59WIB, sesuai dengan surat Kepala BKN Nomor: K26-30/V 141-2/99 tentang perpanjangan jadwal pendaftaran CPNS Tahun 2018, maka diperpanjang sampai dengan 15 Oktober 2018 pukul 23.59WIB.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI (ALOKASI PENEMPATAN)

1. Biro Umum
2. Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia
3. Biro Dukungan Penegakan Hak Asasi Manusia
4. Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
5. Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Aceh, Maluku dan Papua.

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				IPK MINIMUM	JUMLAH FORMASI	KETERANGAN
			Cum laude	Disabilitas	Putra/ Putri Papua dan Papua Barat	Umum			
1	Analisis Aset Negara	S-1 Ekonomi	-	-	-	2	2.75	2	Biro Umum
2	Analisis Hukum	S-1 Hukum	-	-	-	2	3.00	2	Biro Umum
3	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Hukum/S-1 Ekonomi S-1 Sosial Budaya	2	-	-	3	2.75	5	• Biro Umum • Biro Dukungan Pemajuan HAM
4	Analisis Kerjasama	S-1 Hubungan Internasional/ Sastra Inggris	1	-	-	3	2.90	4	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
5	Analisis Keuangan	S-1 Akuntansi	-	-	-	1	3.00	1	Biro Umum
6	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	S-1 Ekonomi Pembangunan/ Manajemen/ Ilmu Statistik	-	-	-	1	3.00	1	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
7	Analisis Organisasi dan	S-1 Ekonomi	-	-	-	2	3.00	2	Biro Umum

8	Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia	S-1 Hukum S-1 Ilmu Sosial dan Politik S-1 Pengelolaan lingkungan hidup S-1 Kriminologi	5	1	1	20	Umum : 3.00 Papua : 2.50 Disabilitas : 2.75	27	• Biro Dukungan Penegakan HAM • 6 Sekretariat Perwakilan Komnas HAM
9	Analisis Perlindungan Hak-Hak sipil dan Hak Asasi Manusia	S-1 sosial S-1 Sosiologi S-1 Ekonomi S-1 Antropologi S-1 Statistik S-1 Ilmu Lingkungan Hidup	4	2	1	4	Umum : 2.75 Papua : 2.50 Disabilitas : 2.75	11	Biro Dukungan Pemajuan HAM
10	Analisis Pengaduan Masyarakat	S-1 Kriminologi S-1 Ilmu Sosial dan Politik S-1 Hukum	-	-	-	9	3.00	9	Biro Dukungan Penegakan HAM
11	Analisis Layanan Penyuluhan dan Layanan Informasi	S-1 Komunikasi S-1 Teknologi Informatika S-1 Ilmu Komputer	-	-	-	3	2.75	3	Biro Dukungan Pemajuan HAM
12	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	S-1 Hukum	-	-	-	1	3.00	1	Biro Umum
13	Analisis Perencanaan Anggaran	S-1 Ekonomi S-1 Ekonomi Pembangunan S-1 Manajemen S-1 Ilmu Statistik	-	-	-	7	3.00	7	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
14	Analisis Sistem Informasi	S-1 Design Komunikasi Visual	-	-	-	2	2.75	2	Biro Dukungan Pemajuan HAM
15	Analisis Tata Usaha	S-1 Manajemen S-1 Ekonomi S-1 Ilmu Administrasi	-	-	-	1	2.75	1	Biro Umum
16	Arsiparis Terampil	D-III Kearsipan	-	-	-	2	2.75	2	Biro Dukungan Penegakan HAM
17	Auditor Ahli Pertama	S-1 Hukum S-1 Kriminologi S-1 Teknik Informatika S-1 Manajemen Informatika	-	-	-	1	3.00	1	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
18	Auditor Terampil	D-III Akuntansi D-III Teknik Informatika D-III Manajemen Informatika	-	-	-	3	3.00	3	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
19	Dokter Ahli Pertama	S-1 Kedokteran	-	-	-	1	3.00	1	Biro Umum
20	Penata Keuangan	S-1 Ekonomi S-1 Akuntansi S-1 Manajemen	-	-	-	2	3.00	2	Biro Umum
21	Peneliti Ahli Pertama	S-1 Hukum	-	-	-	2	2.75	2	Biro Dukungan Pemajuan HAM
22	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	S-1 Akuntansi S-1 Manajemen	-	-	-	1	2.75	1	Biro Umum
23	Pengelola Persidangan	S-1 Ilmu Hukum S-1 Hubungan Internasional	-	-	-	2	2.90	2	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
24	Pengolah Data	D-III Teknik Informatika	-	-	-	8	2.75	8	• Biro Umum • Biro Dukungan Pemajuan HAM
25	Penyusun Bahan Publikasi	S-1 Komunikasi	-	-	-	6	2.75	6	Biro Dukungan Pemajuan HAM
26	Perawat Terampil	D-III Keperawatan	-	-	-	2	2.75	2	Biro Umum
27	Perencana Ahli Pertama	S-1 Ekonomi Pembangunan S-1 Akuntansi S-1 Manajemen S-1 Sosiologi	-	-	-	2	3.00	2	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama

		S-1Kriminologi							
28	Pranata Humas Ahli Pertama	S-1 Ilmu Hukum S-1 Ilmu Komunikasi / Public Relation	-	-	-	3	2.90	3	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
29	Verifikator Anggaran	D-III Manajemen Informatika D-III Teknik Informatika D-III Administrasi Perkantoran D-III Akuntansi	-	-	-	2	3.00	2	Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
30	Verifikator Keuangan	D-III Akuntansi	-	-	-	4	3.00	4	Biro Umum
31	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 Komputer S-1 Manajemen Informatika	-	-	-	3	2.75	3	Biro Dukungan Pemajuan HAM
32	Pranata Komputer Terampil	D-III Komputer/ Teknik Informatika	-	-	-	1	2.75	1	Biro Dukungan Pemajuan HAM
		Total	12	3	2	106		123	

III. KRITERIA PELAMAR

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan di peruntukan bagi pelamar dengan kriteria:
 - a. Cumlaude adalah pelamar lulusan terbaik (Cumlaude/dengan pujian) dari perguruan tinggi terakreditasi A / Unggul dan program studi terakreditasi A / Unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan lulus cumlaude / pujian pada ijazah atau transkrip nilai.
 - b. Disabilitas adalah pelamar yang berkebutuhan khusus / memiliki keterbatasan fisik dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.
 - c. Putra / Putri Papua dan Papua Barat adalah Calon pelamar harus merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
 - d. Umum adalah pelamar yang tidak masuk kriteria sebagaimana huruf a,b, dan c diatas.
2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.

IV. PERSYARATAN PELAMARAN

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Sehat jasmani dan rohani Surat Keterangan sehat jasmani, rohani dan jiwa/mental (Surat Keterangan sehat jasmani dari dokter umum dan surat keterangan sehat mental dari dokter spesialis jiwa RS pemerintah wajib dilengkapi dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir)

8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir).
9. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Bagi Wanita tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama dan adat.
11. Pelamar dengan kategori :
 - a. Putra / Putri Papua dan Papua Barat IPK minimal adalah 2.50 (dua koma lima puluh)
 - b. Disabilitas IPK minimal adalah 2.75 (dua koma tujuh puluh lima)
 - c. Umum IPK minimal adalah 3.00 (tiga koma nol) kecuali untuk:
 - 1) Jabatan Analis Kebijakan Pertama, Penyusun Bahan Publikasi, Analis Perlindungan hak-hak Sipil dan HAM, Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi, Analis Sistem Informasi, Peneliti Ahli Pertama, Pengolah Data, Pranata Komputer Ahli Pertama Dan Pranata Komputer Terampil dengan IPK minimal 2.75 (dua koma tujuh puluh lima)
 - 2) Jabatan Analis Kerjasama, Pengelola Persidangan, Pranata Humas Ahli Pertama dengan IPK minimal 2,90 (dua koma sembilan puluh)
12. Usia pada saat pendaftaran adalah Minimal 18 Tahun dan Maksimal 35 Tahun 0 bulan 0 Hari.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dan unggahan dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman : <https://sscn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau NIK Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga (KK).
2. Dokumen persyaratan yang diunggah terdiri dari :
 - a. Surat lamaran ditujukan Kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp.6000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dapat diunduh melalui laman : www.komnasham.go.id/cpns2018)
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) / kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP.
 - c. Ijazah dan Transkrip Nilai Ijazah asli:
 - 1) Khusus bagi pelamar lulusan Universitas Luar Negeri harus menyertakan Surat Keterangan Penyesuaian Ijazah dan Surat Keterangan penyetaraan nilai dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 - 2) Khusus pelamar dokter dan perawat menggunakan ijazah profesi dan transkrip nilai profesi disertai surat tanda registrasi (STR) asli yang masih berlaku.
 - 3) Khusus untuk pelamar cumlaude, ijazah dan transkrip harus tercantum lulusan cumlaude.
 - d. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan dan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersedia mengabdikan pada instansi Komnas HAM dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS dan Pakta Integritas, harus diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp.6000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena berwarna hitam (format surat pernyataan dan Pakta Integritas dapat diunduh di laman : www.komnasham.go.id/cpns2018 , di Upload di <https://sscn.bkn.go.id> bersama surat lamaran dijadikan 1 set.
 - e. Pas photo berlatar belakang warna merah berukuran 3 x 4 (1 lembar)

- f. Calon Pelamar dari penyandang Disabilitas Fisik wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat Disabilitasnya, dan mencantumkan Nomor telepon pada surat lamaran untuk Verifikasi yang akan dilakukan oleh Panitia Seleksi CPNS Komnas HAM tahun 2018
 - g. Cetak Print Screen direktori hasil akreditasi program studi dari BAN-PT yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> atau surat akreditasi yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti yang dimiliki perguruan tinggi pelamar (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya) (asli/foto copy).
 - h. Pelamar formasi putra / putri Papua dan Papua Barat melampirkan akta kelahiran dan / atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala desa atau kepala suku.
3. Batas waktu pendaftaran dan unggahan dokumen persyaratan pelamaran dimulai pada tanggal **26 September 2018 s.d. 15 Oktober 2018 (ditutup pukul 23.59 WIB)**.
 4. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui laman : <https://sscn.bkn.go.id>

VI. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi CPNS terdiri dari :

1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :
 - a. Substansi Jabatan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dengan bobot 50%
 - b. Wawancara dengan bobot 25%
 - c. Psikotes dengan bobot 25%

Khusus pelamar jabatan prnata komputer, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari:

- a. Substansi Jabatan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dengan bobot 50%
- b. Praktik kerja komputer dengan bobot 20%
- c. Wawancara dengan bobot 20%
- d. Psikotes dengan bobot 10%

VII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil Verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman : www.komnasham.go.id/cpns2018 Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib cetak kartu peserta ujian Seleksi Komputer Dasar (SKD) dari laman : <https://sscn.bkn.go.id>
2. Kelulusan Seleksi Komputer Dasar (SKD) didasarkan pada nilai passing grade yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Jumlah peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar.
4. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.

VIII. LAIN-LAIN

1. Pengumuman penerimaan dilakukan melalui www.komnasham.go.id/cpns2018 pada tanggal 19 September 2018.

2. Tempat Pelaksanaan tahapan seleksi dilaksanakan di Jakarta.
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
4. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan atas kemauan sendiri, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
5. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan atas kemauan sendiri maka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.
6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
8. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
9. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
10. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.komnasham.go.id/cpns2018
11. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018 dapat menghubungi Call Center : Telepon (021) 3145739 pada hari Senin s.d. Jumat Pukul 08.30 s.d. 16.00 WIB, email: sekretariatcpns2018@komnasham.go.id
12. Pengaduan pelaksanaan seleksi CPNS di email : aduanseleksicpns@komnasham.go.id



Jakarta, 05 Oktober 2018
Sekretaris Jenderal,

[Handwritten Signature]
Dr. Tasdiyanto, SP, MSi
NIP. 197207201996031001